

Cukai dan Harga Rokok: Sumber APBN dan Kendali Konsumsi Rokok yang *Win-win Solution*

Tim Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia

Fakta tentang Rokok

- Tahun 2015 - sekitar 370 milyar batang rokok dibakar. Tiap orang, TERMASUK BAYI baru lahir menghabiskan 1.428 batang rokok setahun. Bermanfaat?
- Indonesia juara dalam konsumsi rokok, tetapi semakin tidak berprestasi dalam olah raga internasional. Dampak semakin banyak generasi muda merokok yang menurunkan prestasi bangsa.
- Tahun 2015, sekitar 65 juta rakyat Indonesia “membakar” uang lebih dari Rp 300 Triliun untuk merokok yang mubazir dan sesungguhnya haram (*harmful*) karena membahayakan diri dan orang di sekitarnya.
- Jika uang sebanyak itu digunakan untuk memberangkatkan haji 200.000 umat Islam setiap tahun, cukup untuk lebih 47 tahun.
- Jika uang sebanyak itu digunakan untuk beasiswa program Master di Australia/Eropa/Amerika, cukup untuk mengirim 600.000 mahasiswa TIAP TAHUN. Dampak ekonomi masa depan bangsa akan luar biasa besar.
- Jika uang sebanyak itu digunakan untuk beasiswa program Doktor di Australia/Eropa/Amerika, cukup untuk mengirim 150.000 mahasiswa TIAP TAHUN. Ekonomi Indonesia akan lebih cepat menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia.
- Yang SANGAT menyedihkan, penduduk 60% termiskinlah yang paling banyak merokok dan memperkaya orang terkaya di Indonesia.



- Harga riil rokok di Indonesia terus menurun, relatif semakin murah karena pendapatan per kapita yang naik. Berkah pertumbuhan ekonomi TIDAK dimanfaatkan untuk konsumsi produktif.
- UPAYA Pemerintah mengurangi konsumsi rokok belum efektif karena perokok sudah kecanduan dan iklan rokok jauh lebih gencar dari iklan kesehatan masyarakat
- Fakta di Dunia menunjukkan bahwa Harga Rokok tinggi mampu mencegah remaja membeli rokok. Perlu disadari bahwa di Indonesia, sekitar 20 juta siswa SD-SMA sudah mulai merokok akibat gencarnya iklan rokok. Prestasi mereka di masa datang?
- Selama tahun 2007-2015 terjadi kenaikan pendapatan APBN dari cukai rokok dari Rp 43,5 Triliun menjadi Rp 139 Triliun. Namun, potensi penerimaan masih sangat besar karena demand terhadap rokok bersifat inelastis. Penggunaan dana dari cukai rokok belum didedikasikan untuk merestorasi kesehatan rakyat dan memberdayakan petani dan pekerja dalam industri rokok.

Mitos Kendali Konsumsi Rokok

- Kendali konsumsi rokok menyengsarakan petani dan pekerja dalam industri rokok. Faktanya
 - Impor tembakau naik dari 16,6% kebutuhan di tahun 2000 menjadi 72,5% kebutuhan di tahun 2011 (Statistik perkebunan dan data Kemendag 2013). Nilai impor tembakau Tahun 2010 mencapai USD 378 juta (+ Rp 5 Triliun). Petani asinglah yang diuntungkan
 - Proporsi petani tembakau terhadap total tenaga kerja turun dari 0,8% di Tahun 1990 menjadi 0,5% di tahun 2010. Jauh sebelum 180

negara di dunia ikut Konvensi Pengendalian Tembakau, dimana Indonesia BELUM ikut.

- Porsi pekerja di industri tembakau terhadap pekerja di seluruh sektor industri telah turun dari 3,5% di Tahun 1988 menjadi hanya 1% di Tahun 2012 (statistik angkatan kerja). Porsi pekerja di industri rokok HANYA 0,4% dari total angkatan kerja.
- Sejak Tahun 2000 sampai Tahun 2013, pendapatan pekerja di industri tembakau/rokok relatif Mandeg pada SEPEREMPAT pendapatan pekerja di seluruh sektor Industri (Statistik Upah, BPJS)
- Kendali konsumsi rokok serta merta mematikan Industri dan petani tembakau. Faktanya di dunia hal itu tidak pernah terjadi. Penurunan volume perdagangan bertahap terjadi. Ada kesempatan Pemerintah mengalihkan industri ke industri yang sehat dan bersih lingkungan.
- Kendali konsumsi rokok akan membuat perokok berhenti seketika. Tidak pernah terjadi di dunia. Perokok, yang memang kecanduan, akan tetap merokok meskipun harga rokok naik 3-4 kali lipat. Demand terhadap rokok inelastis
- Kendali konsumsi rokok menurunkan pendapatan negara dari cukai. Keliru. Fakta di dunia menunjukkan bahwa ketika harga dan cukai rokok dinaikan untuk kendali konsumsi, penerimaan negara meningkat.

Penerimaan Negara Akan Naik dengan Kenaikan

Harga dan Cukai Rokok

- Berdasarkan kajian elastisitas permintaan rokok, jika harga rokok dinaikan rata-rata 20% di Tahun 2016, Penerimaan Pemerintah akan naik menjadi Rp 168 Triliun.



- Jika harga rokok dinaikan bertahap sampai 100% dari harga sekarang, tiap tahun naik 20%, Pemerintah akan menerima Rp 350 - Rp 300 Triliun di tahun 2019. Jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan investasi infrastruktur fisik dan sumber daya manusia.
- Kenaikan harga rokok, meskipun tarif cukai naik, industri tembakau/rokok, petani tembakau, dan pekerja dalam Industri rokok akan mendapat tambahan penghasilan. Solusi yang menguntungkan semua pihak

Usulan Kebijakan Visioner

- Kenaikan harga dan cukai rokok merupakan langkah SANGAT STRATEGIS yang mampu mendongkrak reputasi pemerintah, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesehatan dan sekaligus mengembalikan nama baik Indonesia di dunia Internasional.
- Diharapkan Pemerintah membangun Kebijakan Visionerl dengan mendedikasikan dana penerimaan cukai rokok sebagai berikut:
 - 10% untuk melatih dan mensubsidi petani tembakau dan pekerja rokok beralih kerja yang lebih baik guna memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pelajaran dari berbagai negara telah tersedia. Reputasi Pemerintah akan meningkat.
 - 10% untuk membina remaja dalam bidang olah raga dan seni, agar mereka selalu sibuk dan tidak terpengaruh iklan rokok. Hal ini sekaligus menangkal mereka mencari dana dari iklan rokok. Reputasi Pemerintah akan meningkat.
 - 40-50% untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi SELURUH pekerja bukan penerima upah (PBPU)/sektor informal dan anggota keluarganya (sekitar 160 juta penduduk). Iuran JKN yang kini dibayarkan Pemerintah untuk peserta Penerima Bantuan

luran dan pengumpulan iuran dari PBPB sangat tidak memadai yang membuat BPJS Kesehatan defisit dan layanan kesehatan yang dijamin TIDAK BERKUALITAS. Pantaskah ratusan ribu rakyat menderita bahkan mati akibat layanan kesehatan yang dijamin JKN tidak memadai? Hal itu merupakan pelanggaran nyata dari Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Indonesia mampu mengatasi hal itu. Hanya, kemauan politik yang belum belajar dari kebijakan kesehatan di negara lain. Reputasi Pemerintah akan SANGAT BAIK.

- 10% untuk promosi kesehatan, riset kesehatan, dan pendidikan hidup sehat melalui media masa. Reputasi Pemerintah akan meningkat.
- 20-30% untuk membuka lapangan kerja baru yang padat karya seperti membangun jalan dan jembatan baru di luar jawa, membangun pelabuhan di pulau kecil padat penduduk, membangun waduk-waduk, dll. Reputasi Pemerintah akan tetap dikenang berpuluh tahun kemudian.

Jakarta, Juni 2015.

Hasbullah Thabrany

Ketua Tim/Kepala PKEKK UI